ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU

Skripsi Oleh :

NITA APRILIA

NIM. 01081003029

Untuk Memenuhi Sebagian dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

Tahun 2012

S
336.2007
Nit
2012
R. 22652/23166

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi Oleh :

NITA APRILIA
NIM. 01081003029

Untuk Memenuhi Sebagian dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2012

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: NITA APRILIA
NIM	: 01081003029
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATAKULIAH	: PERPAJAKAN
JUDUL DRAFT SKRIPSI	: ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PENERIMAAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : Ketua : Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak.
NIP. 196508161995121001

Tanggal : Anggota : Dewi Rina Komarawati, S.E,M.M, Ak.
NIP. 196209131994032001

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA	: NITA APRILIA
NIM	: 01081003029
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATAKULIAH	: PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 4 Mei 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 4 Mei 2012

Ketua	Anggota	Anggota
Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak	Dewi Rina K, S.E,M.M, Ak	Drs. H. Harun Delmat. M.Si, ak
NIP. 196508161995121001	NIP. 196209131994032001	NIP. 195501131990031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Burhanuddin, M.Acc,Ak.
NIP. 195808281988101001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Alam Nasyrah: 6)

There are thousands to tell you it cannot be done
There are thousands to prophesy failure
But just take off your coat and go to it
Just start to sing as you tackle the thing
That cannot be done, and you'll do it

(Edgar Guest)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:.

- *Allah SWT*
- *Keluargaku*
- *Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas izinNya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Analisis Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Di KPP Pratama Lubuk Linggau.** Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang diukur melalui jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi dan jumlah Surat Pemberitahuan PPh Tahunan Wajib Pajak tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penerimaan PPh Wajib Pajak orang pribadi.

Penulis Berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau dan bahan masukan akademis bagi penelitian selanjutnya.

Penulis

Nita Aprilia

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Linggau."** Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A., Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. H. Syamsurijal, AK, Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanudin M.Acc., Ak., Ketua Jurusan Akuntasi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Almarhum Sulaiman S.M, S.E., M.B.A, Ak., yang mengukir kenangan indah dalam hidup saya.
5. Drs Tertiarto MAFIS., Ak., Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., Ketua Pembimbing Skripsi
7. Dewi Rina Komarawati, S.E., M.M., Ak., Anggota Pembimbing Skripsi
8. Seluruh Dosen FE UNSRI khususnya Dosen Jurusan Akuntansi, yang memberikan ilmu dan motivasi kepada saya untuk menjadi orang yang lebih baik.
9. Pemimpin dan pegawai KPP Pratama Lubuk Linggau.
10. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. *Special thanks to Mr. Adi, you help me so much.*
11. Almarhum Azis Rifai, *you're the best father in the world and always be the best man all my life.*
12. Sulastri, *I just want say that without you, I'm nothing and I love you so much Mom.*
13. Oob, *Dear my sister, you care me so much and do everything that I really need even though it took and disturbed your time, thanks for that.*
14. Lulu, Shella, Sandi, Kakak Angga dan Kakak Ari yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun material.

15. Enja, Rani, Norma, Dwika, Mira, dan Marlia. *One of the best things that I can get in my college life is friendship. All of you created precious memories for my life. I hope we'll always be everlasting best friends.*
16. Lilis Sundari, *even though we had not had much time to spend together like as we're in high school but we can keep our friendship until now.*
17. Siwon, *Give me hug please.*
18. Super Junior, *the last man standing.*
19. Teman-teman sejawat seangkatan di Jurusan Akuntansi 2008 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Indralaya.
20. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis,

Nita Aprilia

UPT PEPPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR 121221
TANGGAL 03 AUG 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF..... iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
UCAPAN TERIMAKASIH..... vi
DAFTAR ISI..... viii
DAFTAR TABEL..... xi
DAFTAR GAMBAR..... xii
DAFTAR LAMPIRAN..... xiii
ABSTRAKSI..... xiv
ABSTRACT..... xv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT..... xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah..... 6
1.3. Tujuan Penelitian..... 6
1.4. Manfaat Penelitian..... 7
1.5. Sistematika Penulisan..... 7
BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Dasar-Dasar Umum Perpajakan
2.1.1. Pengertian Pajak..... 9
2.1.2. Unsur Pajak..... 10
2.1.3. Jenis Pajak..... 11
2.1.4. Asas Pemungutan Pajak..... 12
2.1.5. Perlawanan Pajak..... 13
2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak..... 14
2.1.7. Cara Pemungutan Pajak..... 14
2.1.8. Tarif Pajak..... 15
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak..... 16
2.2.2. Kriteria Wajib Pajak Patuh..... 17
2.2.3. Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Patuh..... 18
2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak
2.3.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak..... 19
2.3.2. Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak..... 20
2.3.3. Fungsi NPWP..... 20
2.3.4. Jangka Waktu dan Tempat Pendaftaran NPWP..... 21
2.3.5. Tata Cara Pendaftaran NPWP..... 23
2.3.6. Tata Cara Pemindahan NPWP..... 25
2.3.7. Sanksi yang berhubungan dengan NPWP..... 26
2.4. Surat Pemberitahuan
2.4.1. Pengertian Surat Pemberitahuan..... 28
2.4.2. Fungsi Surat Pemberitahuan..... 28
2.4.3. Jenis Surat Pemberitahuan..... 29
2.4.4. Pengambilan Surat Pemberitahuan..... 30
2.4.5 Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan..... 30
2.4.6. Sanksi Berkaitan dengan Penyampaian SPT..... 31
2.5. Pajak Penghasilan Orang Pribadi
2.5.1. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi..... 32
2.5.2 Non Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi..... 34
2.5.3 Penghasilan Orang Pribadi 35
2.5.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak..... 39
2.6. Tinjauan Penelitian Sebelumnya..... 41
2.7. Kerangka Pemikiran..... 45
2.8. Hipotesis Penelitian..... 46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Ruang Lingkup Penelitian..... 47
3.2. Jenis Penelitian..... 47
3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data..... 48
3.4. Variabel Penelitian..... 48
3.5 Metode Analisis Data..... 49

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data

4.1.1. Perkembangan Jumlah NPWP OP..... 51

4.1.2. Perkembangan Jumlah SPT Tahunan PPh WPOP..... 52

4.1.3. Perkembangan Realisasi Penerimaan PPh WPOP..... 54

4.1.4. Statistik Deskriptif..... 55

4.1.5. Uji Korelasi Koefisien Ranking Spearman..... 56

4.2. Pembahasan..... 59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan..... 63

5.2. Saran..... 64

Daftar Pustaka..... 66

Lampiran..... 69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tempat Pendaftaran NPWP Bagi WP Tertentu.....	23
Tabel 2.2.	Pengertian Subjek Pajak dan Kewajiban Pajak Subjektifnya	33
Tabel 4.1.	Perkembangan Jumlah NPWP Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Linggau.....	51
Tabel 4.2.	Perkembangan Jumlah SPT WPOP di KPP Pratama Lubuk Linggau.....	52
Tabel 4.3.	Perkembangan Realisasi Penerimaan PPh WPOP di KPP Pratama Lubuk Linggau.....	54
Tabel 4.4.	Statistik Deskriptif Penelitian.....	55
Tabel 4.5.	Spearman Correlation Rank Test	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian..... 45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data dari KPP Pratama Lubuk Linggau.....	69
Lampiran 2	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	76
Lampiran 3	Agenda Konsultasi.....	77
Lampiran 4	Surat Riset/Penelitian.....	80

Analisis Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Linggau

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi diukur melalui jumlah NPWP orang pribadi dan jumlah SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah NPWP orang pribadi, jumlah SPT Wajib Pajak orang pribadi dan penerimaan PPh Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari KPP Pratama Lubuk Linggau dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Metode statistik yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis koefisien korelasi ranking spearman.

Berdasarkan analisis koefisien korelasi ranking spearman, hasil yang didapatkan menunjukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penerimaan PPh Wajib Pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama 2007-2011, jumlah NPWP orang pribadi meningkat sebesar 50,43 tiap tahunnya, jumlah SPT WPOP meningkat sebesar 35,19% tiap tahunnya, dan jumlah penerimaan PPh meningkat sebesar 18,49% per tahun kecuali pada tahun 2009.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan, NPWP dan SPT

The Analysis of Relationship Between Individual Taxpayer Compliance and Individual Taxpayer Income Tax At KPP Pratama Lubuk Linggau

ABSTRACT

This research intends to know whether individual taxpayer compliance had significant relationship toward individual taxpayer income tax. Individual taxpayer compliance is measured by amount of NPWP for individual taxpayer and amount of individual taxpayer SPT were reported. Furthermore, this research intends to know the development of amount of NPWP, the development of amount of individual taxpayer SPT and the development of individual taxpayer income tax. This research uses the secondary data which was obtained from KPP Pratama Lubuk Linggau, for the year from 2007 until 2011. Statistical method used for this research is the method of spearman correlation rank test

Based on calculation of the method of spearman correlation rank test, the obtained result shows that individual taxpayer compliance didn't have significant relationship toward individual taxpayer income tax. This research result shows since 2007-2011, amount of NPWP for individual taxpayer increased 50,43 % every year, amount of individual taxpayer SPT increased 35,19% every year, and amount of individual taxpayer income tax increased 18,49% except in 2009.

Keyword: taxpayer compliance, income tax, NPWP, SPT

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NITA APRILIA

Nim : 01081003029

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU

Pembimbing

Ketua : Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak

Anggota : Dewi Rina Komarawati, S.E,M.M, Ak

Tanggal diuji : 04 Mei 2012

adalah benar-benar hasil karya saya di bawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, 07 Mei 2012

Yang memberi pernyataan,

NITA APRILIA

NIM 0108100303029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembangunan nasional merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Agusti & Herawaty, 2009). Dalam melaksanakan pembangunan nasional, masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pemerintah mengandalkan dua sumber pokok penerimaan negara untuk mengatasi masalah pembiayaan yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri sedangkan bantuan luar negeri dalam bentuk hibah dan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap. Hal ini menekankan bahwa pemerintah harus mampu mengoptimalkan sumber penerimaan dalam negeri. Diantara dua komponen utama penerimaan dalam negeri, penerimaan negara dari sektor pajaklah merupakan sumber penerimaan yang potensial.

Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, upaya yang dilakukan pemerintah ini terlihat dari penetapan

UPT PERPUSTAKAAN

target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan data pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode 2005-2012, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir target penerimaan negara dari sektor pajak selalu mengalami peningkatan rata-rata sebesar 23% setiap tahunnya. Selain itu, dalam kurun waktu lima tahun yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan 2010, pajak telah menjadi sumber utama pendapatan negara dengan berkontribusi sekitar 60% per tahun terhadap penerimaan negara. Ini berarti pajak telah mengalahkan penerimaan negara dari sektor bukan pajak seperti penerimaan dari sektor minyak dan gas yang sebelumnya telah menjadi primadona pendapatan negara.

Pemerintah Republik Indonesia telah menyadari potensi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang dapat diandalkan. Kesadaraan ini ditindak-lanjuti dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui reformasi perpajakan. Pada intinya reformasi mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Agusti & Herawaty, 2009). Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah dan memberikan wewenang kepada fiskus pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak dan Wajib Pajak bersifat pasif. Sedangkan dalam sistem *self assessment system,* pemerintah menempatkan subyek pajak pada kedudukan yang menentukan karena Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban sebagaimana dimaksud undang-undang adalah kewajiban Wajib Pajak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, mengambil sendiri

formulir SPT, mengisi dengan lengkap, jelas, dan benar SPT tersebut, menghitung sendiri pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan, memperlihatkan pembukuan dan data lainya serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya. *Self assessment system* dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah, apabila Wajib Pajak patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan karena kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system* (Agusti & Herawaty, 2009). Wajib Pajak bisa dikatakan patuh apabila ia bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakanya secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan melakukan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Suparto, 2007). Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara berkurang. Oleh karena itulah, Direktorat Jenderal Pajak menganggap kepatuhan Wajib Pajak sebagai faktor utama dalam mempengaruhi realisasi penerimaan negara sehingga Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam bidang perpajakan salah satunya melalui kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia.

Kerjasama tersebut disepakati dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Jenderal Pajak dan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. Direktur Jenderal Pajak berharap Akuntan Indonesia dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan memberikan pencerahan

kepada masyarakat terhadap isu tindak pidana korupsi dan mendorong peningkatan kualitas transparansi, *good governance*, akuntabilitas, serta membangun pemerintahan kredibel, dan berwibawa. Selain dengan Ikatan Akuntan Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Kerjasama ini ditandai dengan kesepakatan penukaran data dan informasi yang berkualitas dengan tujuan yaitu untuk memudahkan Unit Pelayanan Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi melalui pengecekan NPWP dan kepatuhan pajak dari penyedia barang dan jasa, mempermudah proses verifikasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Suparto, 2007). Sistem administrasi perpajakan di Indonesia juga terus mengalami perbaikan dan Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan meliputi modernisasi Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah agar memenuhi tuntutan pelayanan yang baik dalam kerangka *good governance*. Selain itu dilakukan modernisasi paradigma organisasi berdasarkan fungsi yakni pelayanan, penagihan, penyidikan dan lainya sehingga dengan sistem administarasi perpajakan yang modern tidak ada lagi bidang atau seksi yang khusus menangani jenis pajak tertentu. Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern diyakini dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada

Wajib Pajak. Pemberian pelayanan yang sebaik mungkin diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya.

Upaya lainya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan melalui kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi (Pratiwi, 2011). Kegiatan ektensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk menemukan adanya indikasi potensi pajak yang belum tergali dan dimaksudkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terutama Wajib Pajak orang pribadi sedangkan kegiatan intensifikasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar. Dengan langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak menimbulkan pertanyaan bagi peneliti yaitu apakah benar kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Menurut Numantu (2008:150), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan, dan kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Oleh sebab itu, kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam penelitian ini diindentifikasi melalui jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yaitu diukur melalui jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Lubuk Linggau dan Surat Pemberitahuan PPh Tahunan yang dilaporkan tepat waktu oleh Wajib Pajak orang pribadi. Selain itu, Pajak Penghasilan dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini karena menurut Numantu (2008:167), Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak

subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Ini berarti kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek pajak lainya sehingga kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau".

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

a. Bagaimana perkembangan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi, jumlah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, dan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau?
b. Apakah kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi mempunyai hubungan yang signifikan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu

a. Untuk mengetahui perkembangan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi, jumlah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, dan

penerimaan PPh Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Linggau.

b. Untuk memperoleh bukti empiris tentang hubungan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para akademisi dan dapat dijadikan salah satu referensi atau bahan rujukan untuk penelitian yang lebih lanjut yang mengambil objek penelitian yang sama sedangkan manfaat praktis yang diharapkan yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menjawab keyakinan Direktorat Jenderal Pajak atas hubungan kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan apa yang melatar-belakangi penulis melakukan penelitian dan alasan pemilihan judul selain itu juga di dalam bab satu ini diuraikan rumusan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang dijadikan dasar bagi penulis dalam melakukan pembahasan dan analisis masalah yang ada. Oleh karena itu, pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan dasar-dasar umum perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Selain itu juga, bab ini memuat uraian sistematik penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, analisis data. Analisis data memuat prosedur pengujian variabel-varabiel yang dilakukan.

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang data dan fakta yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, analisis dengan metode kualitatif dengan teori-teori yang telah ada, serta dicari alternatif pemecahan masalah.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian dan berisi saran berdasarkan pembahasan data dan informasi yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Agusti, Astri Fika dan Vinola Herawaty. 2009. *Pengaruh Tngkat Kepatuhan Wajib Pajak badan Terhadap Pemeriksaan Pajak yang Dimoderisasi Pemeriksaan Pada KPP Pratama.* Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 12, Palembang

Halim, Rosana. 2004. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak badan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayan Pajak Surabaya Genteng.* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya

Hidayat, Taufik dan Nina Istiadah. 2011. *Panduan Lengkap Menguasai SPSS Untuk Mengolah Data Statistik Penelitian.* Jakarta: Mediakita

Ikatan Akutansi Indonesia. 2011. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan Brevet B Terpadu.* Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Data Pokok APBN 2005-2012*

Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1998-2004.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP 161/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006.* Yogyakarta: Penerbit Andi

Muljiono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak – Akuntansi Perpajakan dan Ketentuan Umum Perpajakan.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Nurmantu, Safri. 2008. *Pengantar Perpajakan Edisi.* Jakarta: Penerbit Granit

Octavia, Vivi. 2010. *Analisis Pengaruh Jumlah NPWP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Palembang.* Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2007 Tanggal 25 Januari 2007 Tentang Susunan Tim Pelaksanan Pemberian NPWP Orang Pribadi Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan di KPP Lokasi Modern dan Non Modern.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 160/PJ/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi Berstatus Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik, dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 /PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 Tanggal 6 Febuari 2008 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

Priyatno, Duwi. 2010. Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian Dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendadaran. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Prastowo, Yustinus. 2009. *Panduan Lengkap Pajak.* Jakarta: Raih Asa Sukses

Purnomo, Djati Hendro. 2010. *Pengaruh Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.* Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta Pusat

Pratiwi, Gusti. 2011. *Pengaruh Jumlah NPWP dan SPT yang Disampaikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama.* Skripsi. ' Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Indralaya

Sutanto, Melina. 2009. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Mataram.* Bachelor Thesis Petra Christian University, Surabaya.

Suryadi. 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak.* Jurnal Keuangan Publik, Volume 4,1 : 105-121.

Suparto, Tulus. 2002. *Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.* Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, Depok.

Tano, Juliana. 2005. *Analisis Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dengan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Palu.* Bachelor Thesis Petra Christian University, Surabaya.

Widiyanti, Vania Yuki. 2007. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Madiun.* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Wijoyanti, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.